



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan kondisi riil di lapangan, maka untuk efektivitas pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Di Lingkungan pemerintah kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagaia berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga Pasal 1 angka 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Honorarium pengelola keuangan/kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola keuangan/kegiatan satuan kerja atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
  - (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada:
    - a. Kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran;
    - b. Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
    - c. Pejabat struktural yang melakukan fungsi keuangan pada perangkat daerah sebagai Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah;
    - d. Kepala Sub bidan, Sub bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dianggarkan pada anggaran belanja berkenaan pada Perengkat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dibuat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Honorarium pengelola barang milik daerah merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola barang satuan kerja atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang;
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. Kuasa pengguna barang;
  - e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
  - f. Pengurus Barang Pengelola;
  - g. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
  - h. Pengurus barang milik daerah;
  - i. Pembantu Pengurus Barang;
  - j. Pengurus Barang Pembantu;
4. Ketentuan dalam Lampiran pada tabel 1, tabel 3, tabel 8 dan tabel 16 diubah, sehingga tabel 1, tabel 3, tabel 8 dan tabel 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

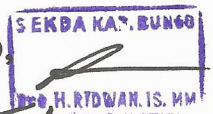
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 2016

**BUPATI BUNGO**

**H. MASHURI**



Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal

2016

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR           TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

TABEL 1

STANDAR BIAYA HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH DAN  
 HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH

| NO                                                             | JABATAN DALAM TIM                 | SATUAN BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1                                                              | 2                                 | 4                 | 5          |
| <b>I HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH</b>             |                                   |                   |            |
| 1                                                              | Pengarah                          | 450.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 270.000           | OK         |
| 2                                                              | Wakil Pengarah                    | 400.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 240.000           | OK         |
| 3                                                              | Penanggung Jawab                  | 380.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 228.000           | OK         |
| 4                                                              | Koordinator                       | 350.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 210.000           | OK         |
| 5                                                              | Ketua                             | 330.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 198.000           | OK         |
| 6                                                              | Wakil Ketua                       | 310.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 186.000           | OK         |
| 7                                                              | Sekretaris                        | 275.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 165.000           | OK         |
| 8                                                              | Wakil Sekretaris                  | 270.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 162.000           | OK         |
| 9                                                              | Anggota                           |                   |            |
|                                                                | Golongan IV                       | 260.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 156.000           | OK         |
|                                                                | Golongan III                      | 205.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 123.000           | OK         |
|                                                                | Golongan II dan I                 | 170.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 102.000           | OK         |
| 10                                                             | Sekretariat                       | 165.000           | OB         |
|                                                                |                                   | 99.000            | OK         |
| <b>II HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH</b> |                                   |                   |            |
| 1                                                              | Kepala Unit Layanan Pengadaan     | 2.500.000         | OB         |
| 2                                                              | Sekretaris Unit Layanan Pengadaan | 2.000.000         | OB         |
| 3                                                              | Anggota Sekretaris                | 1.000.000         | OB         |
| 4                                                              | Koordinator Pokja                 | 2.750.000         | OB         |
| 5                                                              | Anggota Pokja                     | 2.000.000         | OB         |

**Keterangan:**

OB = Orang per Bulan

OK = Orang per Kegiatan

TABEL 3

**STANDAR BIAYA  
HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

Dalam Rupiah

| NO. | JABATAN                               | JABATAN KEDINASAN                                                         | SATUAN BIAYA MENURUT JUMLAH ASET SKPD |             |              |             |    | Ket |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----|-----|
|     |                                       |                                                                           | s/d 1 M                               | 1 M s/d 5 M | 5 M s/d 10 M | Diatas 10 M |    |     |
| 1   | 2                                     | 3                                                                         | 4                                     | 5           | 6            | 7           | 8  |     |
| 1   | Pengelola Barang                      | Sekretaris Daerah                                                         | 800.000                               | 850.000     | 950.000      | 1.100.000   | OB |     |
| 2   | Pejabat Penatausahaan Barang          | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daetra                           | 750.000                               | 780.000     | 815.000      | 900.000     | OB |     |
| 3   | Pengguna Barang                       | Kepala Perangkat Daerah                                                   | 550.000                               | 605.000     | 715.000      | 880.000     | OB |     |
| 4   | Kuasa Pengguna Barang                 | Kepala Unit Pelaksana Teknis                                              | 500.000                               | 600.000     | 700.000      | 850.000     | OB |     |
| 5   | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang | Pejabat Struktural yang membidangi pengelolaan Barang di Perangkat Daerah | 450.000                               | 550.000     | 685.000      | 820.000     | OB |     |
| 6   | Pengurus Barang Pengelola             | Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD                                      | 425.000                               | 500.000     | 640.000      | 780.000     | OB |     |
| 7   | Pembantu Pengurus Barang Pengelola    | Kasubid Pengelolaan Aset BPKAD                                            | 385.000                               | 450.000     | 600.000      | 680.000     | OB |     |
| 8   | Pengurus Barang pengguna              | Pelaksana pada Perangkat Daerah                                           | 315.000                               | 385.000     | 525.000      | 560.000     | OB |     |
| 9   | Pembantu Pengurus Barang              | Pelaksana pada Perangkat Daerah                                           | 250.000                               | 300.000     | 350.000      | 450.000     | OB |     |
| 10  | Pengurus Barang Pembantu*)            | Pelaksana pada Perangkat Daerah                                           | 200.000                               | 250.000     | 300.000      | 350.000     | OB |     |

**Keterangan:**

OB = Orang perbulan

\*) Pengurus Barang Pembantu Ditunjuk Sesuai Kebutuhan

TABEL 8

**STANDAR BIAYA**  
**HONORARIUM/UPAH PEKERJAAN NON PNS BULANAN**

| No       | Uraian                                              | Satuan Biaya (Rp) | Ket |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1        | 2                                                   | 3                 | 4   |
| <b>1</b> | <b>TENAGA ADMINISTRASI KANTOR</b>                   |                   |     |
| a        | Tenaga Administrasi                                 |                   |     |
|          | 1) Operator Komputer                                | 800.000           | OB  |
|          | 2) Pembantu Administrasi                            | 800.000           | OB  |
| b        | Petugas Arsip                                       | 800.000           | OB  |
| <b>2</b> | <b>TENAGA TEKNIS OPERASIONAL</b>                    |                   |     |
| a        | Pelayan                                             |                   |     |
|          | 1) Kantor                                           | 800.000           | OB  |
|          | 2) Rumah tangga dinas jabatan                       | 800.000           | OB  |
| b        | Petugas keamanan                                    |                   |     |
|          | 1) Kantor                                           | 800.000           | OB  |
|          | 2) Rumah tangga dinas jabatan                       | 800.000           | OB  |
|          | 3) Fasilitas umum (terminal, pasar dll)             | 800.000           | OB  |
|          | 4) Sat. Pol. PP                                     |                   |     |
|          | a. Tenaga Administrasi                              | 800.000           | OB  |
|          | b. Petugas Pos Penjagaan                            | 1.150.000         | OB  |
| c        | Petugas kebersihan                                  |                   |     |
|          | - Tebas bayang                                      | 900.000           | OB  |
| d        | Sopir kendaraan                                     |                   |     |
|          | 1) Sopir Bupati                                     | 1.500.000         | OB  |
|          | 2) Sopir Wakil Bupati                               | 1.500.000         | OB  |
|          | 3) Sopir Sekretaris Daerah                          | 1.500.000         | OB  |
|          | 4) Sopir Ketua TP-PKK/Ibu Bupati                    | 1.500.000         | OB  |
|          | 5) Sopir ibu Wakil Bupati                           | 1.500.000         | OB  |
|          | 6) Adc Ketua TP-PKK                                 | 1.500.000         | OB  |
|          | 7) Adc Wakil Ketua TP-PKK                           | 1.500.000         | OB  |
|          | 8) RSUD/Puskesmas, Perpustakaan keliling dan Kantor | 800.000           | OB  |
| e        | Petugas penyiar RSPD                                | 800.000           | OB  |
| f        | Petugas peliput berita                              | 800.000           | OB  |
| g        | Petugas santelda                                    | 800.000           | OB  |
| h        | Petugas protokoler                                  | 800.000           | OB  |
| i        | Penjaga sekolah (SD, SLTP, SLTA)                    | 800.000           | OB  |
| j        | Room boy                                            | 800.000           | OB  |
| k        | Petugas Laundry                                     |                   |     |
|          | 1) RSUD                                             | 800.000           | OB  |
|          | 2) Rumah tangga dinas jabatan                       | 800.000           | OB  |
| l        | Juru masak                                          |                   |     |
|          | 1) RSUD                                             | 800.000           | OB  |
|          | 2) Rumah tangga dinas jabatan                       | 800.000           | OB  |

TABEL 16

**STANDAR BIAYA**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS BERDASARKAN**  
**PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

| No         |               | URAIAN                  | SATUAN BIAYA<br>(RP) | KETERANGAN |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 1          |               | 2                       | 3                    | 4          |
| <b>I</b>   | 1             | Eselon II               | 2.000.000            | OB         |
|            | 2             | Eselon III              | 1.500.000            | OB         |
|            | 3             | Eselon IV               | 1.100.000            | OB         |
|            | 4             | Golongan IV             | 1.000.000            | OB         |
|            | 5             | Golongan III            | 1.000.000            | OB         |
|            | 6             | Golongan II             | 800.000              | OB         |
|            | 7             | Golongan I              | 600.000              | OB         |
|            | 8             | Guru                    | 450.000              | OB         |
|            | 9             | Pengawas Sekolah        | 500.000              | OB         |
| <b>II</b>  | <b>Zona A</b> |                         |                      |            |
|            | 1             | Camat                   | 2.000.000            | OB         |
|            | 2             | Sekcam                  | 1.500.000            | OB         |
|            | 3             | Eselon IV               | 1.100.000            | OB         |
|            | 4             | Staf Gol IV dan Gol III | 1.000.000            | OB         |
|            | 5             | Staf Gol II             | 800.000              | OB         |
|            | 6             | Staf Gol I              | 600.000              | OB         |
|            | <b>Zona B</b> |                         |                      |            |
|            | 1             | Camat                   | 2.100.000            | OB         |
|            | 2             | Sekcam                  | 1.600.000            | OB         |
|            | 3             | Eselon IV               | 1.200.000            | OB         |
|            | 4             | Staf Gol IV dan Gol III | 1.100.000            | OB         |
|            | 5             | Staf Gol II             | 900.000              | OB         |
|            | 6             | Staf Gol I              | 700.000              | OB         |
|            | <b>Zona C</b> |                         |                      |            |
|            | 1             | Camat                   | 3.000.000            | OB         |
|            | 2             | Sekcam                  | 2.200.000            | OB         |
|            | 3             | Eselon IV               | 1.800.000            | OB         |
|            | 4             | Staf Gol IV dan Gol III | 1.800.000            | OB         |
|            | 5             | Staf Gol II             | 1.600.000            | OB         |
|            | 6             | Staf Gol I              | 1.200.000            | OB         |
| <b>III</b> |               | Lurah                   | 1.250.000            | OB         |
|            |               |                         |                      |            |

**Keterangan :**

- 1 OB = Orang Perbulan
- 2 Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja ditetapkan sendiri
- 3 Zona A yang meliputi Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bungo Dani dan Kecamatan Bathin III
- 4 Zona B yang meliputi Kecamatan Pelepat, Pelepat Ilir, Rantau Pandan, Tanah Sepenggal, Tanah Tumbuh, Jujuhan, Muko-Muko Bathin VII, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas dan Bathin II Pelayang
- 5 Zona C yang meliputi Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu, dan Limbur Lubuk Mengkuang

BUPATI BUNGO,

SEKDA KAB. BUNGO